

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu wilayah yang sangat luas dan mempunyai sumber daya alam tanpa batas mulai dari keindahan pulaunya dan beragam suku serta budaya yang menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan. Namun, dari keindahan pulaunya dan memiliki curah hujan tinggi hal itu membuat Indonesia menjadi rentan bencana (Ulum, 2013). Hampir setiap musim berganti Indonesia terus menerus memperbaiki perekonomian negara, lingkungan sosial dan infrastruktur karena merasakan bencana alam. Apalagi setiap musim penghujan tiba bencana alam sering terjadi salah satunya adalah banjir. Bencana banjir seringkali mengancam kehidupan masyarakat terutama untuk masyarakat yang bertempat tinggal di dataran pinggir sungai. Banjir biasanya terjadi karena adanya kenaikan tanggul atau bendungan sehingga air meluap, bencana banjir juga dapat mempengaruhi kesehatan, karena menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, hingga mencemari mata air bersih (Putri, 2021).

Menurut Putri (2021) banjir adalah bencana yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi adalah salah satu wilayah yang sering mengalami banjir ketika musim penghujan tiba di Kabupaten Bekasi, banjir terjadi pada beberapa tahun belakangan ini disebabkan dari dampak dari pembangunan gedung-gedung tinggi karena Kabupaten Bekasi sendiri adalah daerah industri yang menjadikan banyak lahan untuk pembangunan.

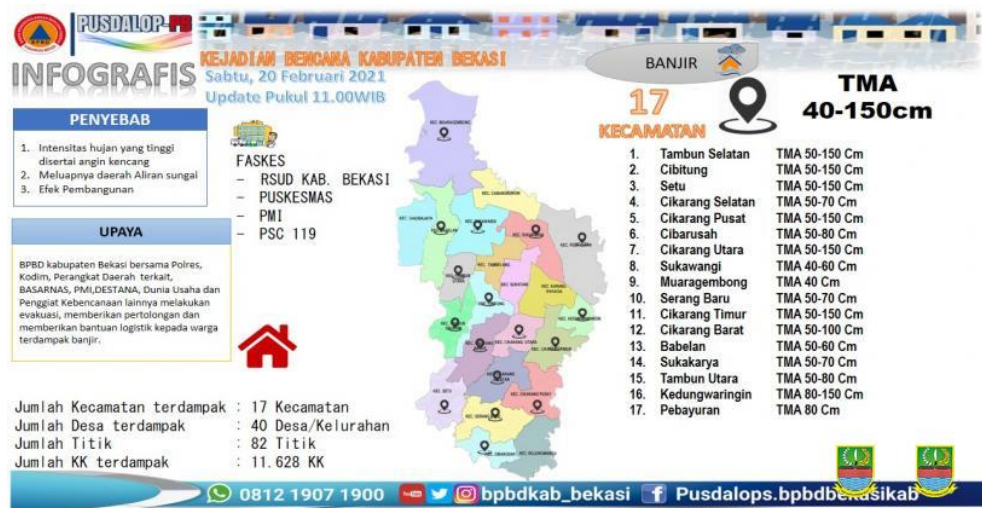
Gambar 1. Banjir di Kabupaten Bekasi



Sumber : Republika.co.id (2021)

Banjir di Kabupaten Bekasi yang terjadi pada setiap tahun di setiap wilayah yang terdampak banjir karena terdapat beberapa wilayah yang dilalui Sungai Citarum, Sungai Ciherang, Kali Busa, Kali Pisang Batu, Kali Jambe, Kali Kalen Rowan dan kali CBL yang sering terkena rawan banjir karena semakin banyak sampah yang memenuhi sungai-sungai tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Bekasi harus lebih melakukan pelebaran.

Gambar 2. Wilayah Kabupaten Bekasi yang Terendam Banjir Pada Februari 2021.



Sumber : Pusdalop BPBD Kabupaten Bekasi (2021)

Dari gambar dapat 2 tersebut dapat dilihat bahwa ada 17 Kecamatan dengan jumlah 40 desa yang terdampak banjir di Kabupaten Bekasi sehingga RSUD Kabupaten Bekasi, PMI dan Puskesmas desa setempat dan PSC 119 beberapa pihak ikut membantu dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut juga dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut adalah wilayah di Kabupaten Bekasi yang terendam banjir pada Februari 2021.

Tabel 1. Kecamatan di Kabupaten Bekasi yang Terendam Banjir

Pada Minggu, 07 Februari Tahun 2021

No.	Kecamatan	Tinggi Muka Air
1.	Babelan	50 - 60 cm
2.	Tambun Utara	50 cm
3.	Muaragembong	10 – 100 cm
4.	Cibitung	10 – 80 cm
5.	Cabangbungin	20 – 60 cm
6.	Cikarang Utara	30 – 150 cm
7.	Pebayuran	20 – 50 cm
8.	Sukawangi	30 – 60 cm
9.	Cikarang Timur	60 cm
10.	Cikarang Barat	20 – 60 cm
11.	Tambun Selatan	10 – 50 cm
12.	Sukatani	20 – 100 cm

Sumber: BPBD Kabupaten Bekasi dalam penelitian Putri (2021)

Dari tabel 1, beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Bekasi mengalami bencana banjir yang tinggi debit air paling tinggi ialah 150 cm di Kecamatan Cikarang Utara dan paling rendah hanya 10 cm di kecamatan Babelan, Muaragembong, Cibitung, dan Tambun Selatan. Dari wilayah yang sedang mengalami banjir sudah seharusnya membutuhkan peran pemerintah yang wajib melakukan penanggulangan bencana banjir tersebut. Akibat dari dampak bencana banjir yang merugikan manusia setiap tahunnya, wilayah terendam banjir yang cukup tinggi pada Tahun 2021 banjir di Kabupaten Bekasi menyebabkan kerugian harta benda beserta rusaknya infrastruktur (Putri, 2021). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Data Kerugian Infrastruktur Akibat Banjir di Kabupaten Bekasi
Tahun 2019 hingga Februari 2021

Tahun	Pembangunan	Luas/jumlah
2019	Tanggul Jebol	810 m
	Jalan Rusak	9,5 km
	Rumah Terendam	5.931 Unit
	Sekolah Terendam	85 Unit
	Sawah	2.939 Hektar
	Tambak	2.341 Hektar

2020	Tanggul Jebol	3,5 Km
	Jalan Rusak	25,30 km
	Rumah Terendam	18.621 Unit
	Sekolah Terendam	284 Unit
	Sawah	5.569.856 Hektar
	Tambak	5.283.495 Hektar
2021	Tanggul Jebol	2 km
	Jalan Rusak	20,37 Km
	Rumah Terendam	15.485 Unit
	Sekolah Terendam	178 Unit
	Sawah	4.443.315 Hektar
	Tambak	4.328.178 Hektar

Sumber: BPBD Kabupaten Bekasi dalam penelitian (Putri, 2021)

Pada tabel 2 diatas, kerugian masyarakat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir di Kabupaten Bekasi. Dapat dilihat bahwa rumah-rumah warga yang terendam banjir hampir 30.000 rumah dalam kurun tiga tahun terakhir. Selain itu, sekolah-sekolah juga terendam banjir yang dapat mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak sekolah akibat banjir yang terjadi.

Tabel 3. Data Informasi Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021

Tahun	Kecamatan	Desa	Tinggi muka air	Korban terdampak
2020	Tambun selatan	Jatimulya	60 cm	1,200 jiwa
		Setia mekar	80 cm	480 jiwa
2021	Tambelang	Sukabakti	30- 40 cm	360 jiwa
		Pebayuran	Karangsegar	10-60cm
		Karangharja	10-100 cm	210 jiwa
		Sumbersari	10-100cm	516 jiwa
		Karang sari	60cm	
	Tambun utara	Sriamur	50 cm	198 jiwa
		Jejalen jaya	40 cm	400 jiwa
		Satria jaya	50 cm	1280 jiwa
	Sukawangi	Sukadaya	20-50cm	150 jiwa
		Sukamekar	40-80 cm	
		Sukabudi	30-60cm	
Sukatani	Sukamulya	20-100 cm		

		Sukamanah	20-100 cm	642 jiwa
		Sukarukun	30 cm	240 jiwa
	Setu	Cikarageman	40-70cm	956 jiwa
	Bojongmangu	Sukamukti	20-50cm	400 jiwa
	Cikarang Barat	Kalijaya	20-60cm	
	Cibitung	Sindang sari	50- 60 cm	
		Simpangan	40-70 cm	
	Cikarang Utara	Karangaharja	20-100cm	2650 jiwa
		Tanjung sari	20-150 cm	1464 jiwa
		Simpangan	80-100cm	1200 jiwa
	sukakarya	Sukajadi	45 cm	
	Cikarang Timur	Karangsari	50-160 cm	
		Labansari	30-200cm	
		Cipayung	30-150cm	300 jiwa
		Pasirranji	10-60cm	1080 jiwa
		Jayasakti	60–120cm	35 jiwa
	Cikarang pusat	Buni baru	40-50 cm	
	Babelan	Buni Bakti	15-120cm	
		Pantai hurip	15-20cm	
		Kebalen	50 cm	
	Keduang waringin	Bojongsari	30-80cm	316 jiwa
	Tambun selatan	Jatimulya	10-45 cm	1680 jiwa
		Lambang sari	60 cm	300 jiwa
		Mangunjaya	60cm	1200 jiwa
		Mekarsari	60cm	480 jiwa

Sumber : Pusdalos-PB BPBD Kabupaten Bekasi

Dari tabel 6, maka dijelaskan dari bencana banjir di Kabupaten Bekasi selama tahun 2020 hingga tahun 2021 akhir ada 16 Kecamatan yang mengalami bencana banjir, dari tingkat korban terdampak yang tertinggi ialah diwilayah Cikarang Utara yaitu ada 2650 jiwa dan korban terdampak yang terkecil ialah di wilayah Jayasakti, Muara Gembong yaitu 35 jiwa. Banjir yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut mengalami pasang surut dari ketinggian muka air yang terjadi banjir diwilayah terparah adalah Labansari di Kecamatan Cikarang Timur yang berkisar antara 30 hingga 200 cm dan tidak ada korban yang terdampak.

Untuk mengantisipasi munculnya korban dari bencana banjir, pemerintah kabupaten bekasi mengeluarkan imbauan waspada terhadap darurat banjir, angin puting

beliung maupun tanah longsor di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Namun, upaya penanggulangan serta pencegahan bencana banjir dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi yang dilihat dari pengalaman masih belum maksimal, banjir masih mengancam dan bahkan wilayah Kabupaten Bekasi yang terendam banjir semakin banyak (Putri et al., 2021). Pemerintah berkewajiban melakukan penyelenggaraan penanganan bencana dengan melaksanakan rekonstruksi fasilitas dan rehabilitasi dari pasca bencana. Selain itu, pemerintah berupaya memberikan hak dan jaminan kepada penduduk yang terdampak bencana banjir secara merata bertujuan mengantisipasi korban.

Pemulihan kondisi pasca bencana dan pembagian biaya penanggulangan bencana dalam anggaran belanja negara yang cukup dan sudah siap pakai yang seharusnya menjadi jaminan tanggungan bagi korban bencana (Suryadi, 2020). Upaya pemerintah dalam merespon bencana banjir harus dimulai dengan kebijakan tanggap bencana lokal yang konsisten dengan peraturan yang berlaku. Akibat dari dampak bencana banjir yang merugikan manusia setiap tahunnya, selain kerugian harta benda banjir di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 yang cukup tinggi dan merendam banyak wilayah juga menyebabkan kerugian berserta rusaknya infrastruktur (Putri, 2021).

Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menanggulangi bencana sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan fungsi BPBD yaitu untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menanggulangi bencana dan untuk menangani pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk menanggulangi bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tujuan dibentuknya BPBD Kabupaten Bekasi adalah sebagai bentuk proaktif dari pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi bencana serta merumuskan kebijakan yang telah ditetapkan dengan meninggalkan pola

lama yang berpusat pada tanggap darurat untuk upaya pemecahan persoalan dari sumber masalahnya dan menjadikan upaya menanggulangi bencana menjadi hal yang tidak terpisahkan dari program pembangunan pemerintah, karena hampir sebagian wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang rawan bencana alam (Putri, 2021).

Ancaman yang muncul dalam proses penanganan korban bencana ialah dengan membangun keharmonisan dan kerjasama antara para *stakeholder* yang terlibat, munculnya berbagai masalah pasca bencana, seperti banyaknya korban yang tidak memperoleh layanan kesehatan, tidak meratanya kebutuhan logistik, banyaknya korban yang tidak terjangkau bantuan, informasi yang tidak jelas, kebijakan yang kurang konsisten, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan indikasi yang menjadi pertimbangan agar kerjasama yang belum terkoordinasi menjadi optimal (Putri *et al.*, 2021).

Menurut hakekatnya, jika tujuan organisasi tidak mungkin dicapai secara individual atau mandiri (*independen*) maka dibutuhkan sebuah organisasi, dua atau tiga organisasi yang memiliki persamaan tujuan sehingga dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama (H. Islamy, 2018). Hal ini terdapat dua hal penting yakni organisasi berawal dengan berdiri sendiri (*independen*) dan adanya kebutuhan akan pencapaian tujuan dan objek yang sama dari tiap-tiap organisasi, maka organisasi dapat bekerjasama (Raharja, 2015).

Menurut H. Islamy (2018) Kolaborasi merupakan suatu proses untuk bekerja sama dengan saling berkontribusi, serta saling dependensi dari peran dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, membutuhkan kecerdasan untuk berkomunikasi secara konsisten, akan menciptakan kolaborasi yang saling berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena itu, dalam melakukan kolaborasi yang dapat membangun kesadaran saling ketergantungan sangat dibutuhkan oleh para aktor yang harus percaya bahwa mereka

berproses bersama dan saling peduli sesama aktor lainnya yang terlibat. Dalam proses ini para aktor harus merasa bergantung secara positif dan terikat dengan antarsesama aktor lainnya dalam berkolaborasi dengan tanggung jawab penuh atas programnya.

Mengingat adanya berbagai masalah yang sering dialami pemerintah dalam menghadapi bencana, untuk itu perlu diadakannya kerjasama atau kolaborasi dengan masyarakat, perguruan tinggi, pihak swasta, dan media massa untuk mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan kerjasama antara para *stakeholder*, komitmen merupakan salah satu faktor keberhasilan, walaupun dalam melakukan komitmen terkadang memicu kebingungan, karena membangun kepercayaan memerlukan suatu proses yang memakan waktu (H. Islamy, 2018). Terlebih lagi hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, bukan hanya dilakukan pemerintah saja tetapi kelompok lain dapat berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam menghadapi permasalahan bencana. Oleh karena itu, berdasarkan penemuan Ulum (2013) dalam penanganan banjir memerlukan banyak pihak dan termasuk keikutsertaan masyarakat dengan tujuan agar strategi ini dapat mengurangi banjir yang lebih buruk kedepannya. Karena, *collaborative governance* adalah sebuah solusi yang berkelanjutan dan dilakukan secara menyeluruh yang sekaligus sebagai edukasi antara masyarakat dan pemerintah (Hapsari & Zaenuarianto, 2016).

Penting dilakukannya *Collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) karena kebijakan yang gagal di tingkat lapangan; berbagai kelompok terkait tidak mampu sebab ada pemisahan kekuasaan dalam menggunakan lingkungan lembaga lainnya yang dapat menghambat pada pengambilan kekuasaan; bentuk pengarahan dari kelompok kepentingan, dan besarnya anggaran memanipulasikan kebijakan. Dalam proses penanganan korban bencana terdapat ancaman-ancaman yang muncul seperti dengan membangun keharmonisan dan kerjasama antara para *stakeholder* yang terlibat, seperti

banyaknya masyarakat terdampak bencana yang tidak mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh, tidak teraturnya dalam pembagian kebutuhan logistik, masih banyak bantuan yang tidak diberikan kepada korban, berita yang masih simpang siur, keputusan yang masih kurang konsisten, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut merupakan indikasi yang menjadi pertimbangan agar kerjasama yang belum terkoordinasi menjadi optimal (Putri *et al.*, 2021). Dalam hal ini, membutuhkan kecerdasan untuk berkomunikasi secara konsisten, akan menciptakan kolaborasi yang saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam proses ini para aktor harus merasa bergantung secara positif dan terikat dengan antarsesama aktor lainnya dalam berkolaborasi dengan tanggung jawab penuh atas programnya (H. Islamy, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul ***“Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi”***.

1.2 Perumusan masalah

Agar penelitian dapat dilakukan secara tepat, peneliti harus menentukan permasalahan, sehingga dapat dipahami darimana akan memulai penelitian ini. Perumusan masalah dibutuhkan agar mempermudah penjelasan data dan fakta secara mendalam. Dari latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana keterlibatan *stakeholders* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi.
3. Menganalisis keterlibatan *stakeholders* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berlandaskan dari berbagai penelitian terdahulu maka, peneliti membuat signifikansi penelitian menjadi dua bagian yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis dipaparkan sebagai berikut.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagai pengkajian yang terkait dengan penanggulangan banjir yang telah di lakukan. Berdasarkan undang-undang tentang peraturan pemerintah adanya peraturan terhadap penyelenggaraan penanggungan bencana contohnya pada rujukan pertama dalam penelitian Ayu Anggita Sari *et al.*, (2020) berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik”. Pengkajian tersebut dilatarbelakangi oleh bencana banjir di Kabupaten Gresik yang disebabkan karena sungai yang tidak dapat menampung lebih volume air.

Penelitian tersebut berfokus pada peran BPBD dalam manajemen bencana saat tanggap darurat bencana banjir di Kali Lamong Kabupaten Gresik. Peneliti memakai metode deskriptif kualitatif. Perolehan data untuk memperoleh data ialah data primer dan data sekunder dengan menggunakan konsep manajemen

bencana menurut Brian & P (2010) dan menggunakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Hasil yang didapat adalah bahwa peran Badan Penanggulangan. Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam menghadapi bencana berdasarkan pada dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini termasuk penilaian cepat dan akurat, program mobilisasi tenaga kerja, penyebaran kebutuhan logistik, penyelamatan korban, evakuasi, dan pemulihan dini telah ditetapkan, dilaksanakan dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk kelancaran penanggulangan bencana. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan permasalahan yang mengkaji tentang penanggulangan bencana banjir yang ditimbulkan karena meluapnya air sungai.

Dalam rujukan kedua dari penelitian yang dilakukan oleh Putri, Shufi Soenarto Purnamsari, Hanny Azizah, Ani Nurdiani (2021) yang berjudul “Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini didasari oleh penyebab banjir di Kabupaten Bekasi beberapa tahun terakhir ini karena hujan deras sehingga menyebabkan sejumlah sungai meluap antara lain Kali Cijambe, Kali Sadang, Kali Cibee, Cilemahabang dan Kali Citarum. Dari aspek pengendalian sistem hidrologi regional sangat diperlukan bagi Kabupaten Bekasi, DAS terbentuk karena sungai-sungai besar yang mengalir ke sungai kecil. Fokus penelitian ini untuk mengetahui langkah manajemen strategi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi banjir.

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan

menggunakan perolehan dari data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan serta dokumentasi dengan merujuk pada teori manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2008) menyebutkan ada empat tahapan dalam manajemen strategi yaitu analisis lingkungan, penentuan kebijakan, penerapan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa manajemen strategis yang diterapkan BPBD dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi belum optimal. Keterkaitan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah karena penelitian tersebut membahas strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dalam menangani bencana banjir yang merupakan permasalahan yang penulis ingin teliti.

Rujukan ketiga dalam penelitian Dwi Agustina, (2018) yang berjudul “Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta” penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pada tahap pemerintah dan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Kolaborasi yang dilakukan Aparatur Pemerintah DIY Dan PRB Forum DIY dalam Penanggulangan Bencana di Yogyakarta. Dengan mengacu pada teori teori yang mengkaji *collaborative governance* seperti *collaborative planning*, *collaborative process*, *network management*, *collaborative public management*, *environemntal governance*, dan *conflict resolution*. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori-teori terkait kebencanaan dan manajemen bencana di bawah *United Nations Development*

Programme (UNDP) dan lembaga PBB.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan review bahan tertulis. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Yogyakarta telah dilaksanakan mulai dari berbagai macam sektor secara *collaborative* dan masing-masing para pemangku kepentingan sudah sesuai dengan perannya masing-masing. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah acuan karena ada beberapa hal yang menjelaskan permasalahan yang terkait dalam penelitian peneliti seperti kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana.

Rujukan keempat dalam penelitian yang dilakukan Dwi Nur Ilma Aulia (2019) yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros” penelitian ini di latarbelakangi mengenai bencana banjir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan ribuan rumah warga terendam, banjir juga menggenangi area persawahan, jalan protokol penghubung Makassar-Maros dan Maros-Pangkep sehingga menimbulkan kemacetan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik perolehan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam Teknik analisis data peneliti menggunakan data model Miles dan Huberman Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*, untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi, dan penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*.

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah yang

baik dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros terkhusus di dua Dusun yakni Dusun Tombolo dan Dusun Baddo ujung dengan merumuskan ketiga aspek yaitu mengembangkan atau merencanakan, melaksanakan atau melaksanakan dan mengevaluasi: mengembangkan atau merencanakan, serta memperlihatkan bahwa rencana yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah sudah melaksanakan bermacam-macam jenis perencanaan pembangunan, termasuk pembahasan banjir penanggulangan bencana serta untuk rumusan atau rencana lain yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros menyelenggarakan program Kampung Iklim, yang menangani banjir dengan adaptif dan tindakan untuk mengurangi dampak bencana.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dilihat bahwa penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah membahas mengenai bagaimana *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir yang memfokuskan mengenai strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rujukan kelima di lihat dari penelitian yang di lakukan Tika Mutiarawati (2021) dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan" penelitian ini di latarbelakangi permasalahan yang terjadi didaerah sekitar pantai Kota Pekalongan yaitu bencana alam rob yang menggenangi daerah tersebut. Kota Pekalongan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara, dan di Kelurahan Bandengan yang terkena dampak rob paling parah. Luasan genangan rob tidak hanya menggenani pemukiman warga tetapi seluruh wilayah daratan termasuk persawahan, perladangan, dan

perkebunan. Dampak yang di timbulkan bencana rob ini adalah lingkungan menjadi kumuh, kesehatan warga terganggu, kurangnya kualitas air bersih, hingga warga kehilangan mata pencahariannya. *Stakeholders* pada penelitian ini dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Fasilitator Kelurahan Senior Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Bandengan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bandengan dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bandengan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan tahun 2015 dan hambatan yang muncul dalam penangan rob, dengan mengacu pada teori delapan indikator keberhasilan kolaborasi menurut DeSeve (2007). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif, dengan tiga bagian analisis yaitu minimisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Informan dipilih berdasarkan metodologi teknik *purposive* yang nantinya menjadi *snowball sampling*.

Dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa para pemangku kepentingan sudah berkolaborasi secara intensif dan tidak membentuk hirarki hanya saja lebih cenderung monoton. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan karena dapat menjadikan sebagai bahan pendukung mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam berkolaborasi. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Rujukan keenam dalam penelitian yang di lakukan oleh Mariana (2015) dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banjir bandang pada Kabupaten Sungai Mandau, banjir tersebut berdampak pada masyarakat sekitar khususnya; kerusakan perkebunan, persawahan dan kematian ternak penduduk. Penelitian ini berfokus dalam bagaimana strategi Bupati Siak Kabupaten Sungai Mandao dalam penanggulangan banjir tahun 2013? Pada tahun 2013, faktor apa yang menghambat BPBD dan Kementerian Sosial dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak dalam menangani bencana banjir di Sungai Mandao. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis menurut Rahardjo Adisasmita (2011:53), koordinasi menurut Handayaniingrat, (2002:88) dan prinsip koordinasi menurut sopomo (2006:19).

Penelitian ini memakai metode kualitatif dan pengelolaan data dilaksanakan bersamaan dengan observasi. Teknik perekrutan informan memakai teknik *purposive sampling*, teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yakni wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak telah membentuk kebijakan untuk menanggulangi bencana dengan berkolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dari lembaga-lembaga, karena para lembaga tengah melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada beberapa aspek yang menjadi penghambat proses pelaksanaan kebijakan seperti masih kurangnya perencanaan, kurangnya transportasi, dan kurangnya memahami risiko bencana serta kesadaran dari masyarakat dalam pencegahan bencana banjir.

Penelitian ini relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

karena sebagai acuan untuk dapat mengetahui teori *collaborative governance* serta bagaimana strategi pemerintah ataupun kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menanggulangi tingkat pasca bencana harus dilakukan karena masyarakat tertekan akan ancaman banjir dan tempat tinggalnya juga harus dibetulkan demi masyarakat dapat menjalankan dan menata kehidupannya kembali dengan baik.

Rujukan ketujuh dalam jurnal penelitian eJournal Ilmu Pemerintahan, yang dilakukan oleh Novan Suryadi (2020) berjudul "Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda" penelitian ini di latarbelakangi oleh bencana banjir yang terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kerugian dan frekuensi bencana banjir. Bencana banjir bisa terjadi karena keadaan alam misalnya: curah hujan tinggi dan pasang surut air laut. Penelitian ini memiliki permasalahan dengan pemerintah untuk menangani banjir di Kota Samarinda serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir di Kota Samarinda. Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.. Teknik perolehan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.serta analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan A Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2010).

Hasil yang didapat oleh penelitian ini adalah peran BPBD dalam penanggulangan risiko banjir pada Desa Sempaja Selatan sangat bagus, nampak dari peran BPBD dalam implemntasi pedoman untuk mengatasi bencana secara handal dan efisien agar dalam menangani bencana sesuai dengan kebutuhan situasi. Adanya komunikasi yang baik dengan lembaga yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa usaha yang dilakukan oleh BPBD

untuk menjalankan diseminasi kepada publik sebelum terjadinya bencana dalam upaya yang jelas oleh pemerintah daerah Kota Samarinda. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian peneliti karena penelitian ini dapat di jadikan rujukan dalam teori *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir.

Rujukan kedelapan dapat di lihat juga penelitian yang dilakukan oleh Nia Kurniasari dan Windi Wijaya (2018) berjudul “Peran *Stakeholder* dalam Pengendalian Banjir Bandang dengan Menggunakan Metode Analisis Mactor (Studi Kasus: Banjir Bandang di DAS Cimanuk Kabupaten Garut).” Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan banjir bandang yang menerjang Kecamatan Bayongbong, Garut Kota, Banyuresmi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karang Pawitan dan Samarang dikarenakan oleh deretan wilayah pinggir sungai Cimanuk hancur.

Permasalahan dari penelitian tersebut adalah peran *stakeholder* dalam menangani banjir bandang pada sungai Cimanuk Kabupaten Garut dengan merujuk pada konsep program MACTOR (*Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations*). Penelitian tersebut berfokus dalam menggali peran dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian banjir bandang. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dengan teknik pengambilan informan menggunakan snowball sampling.

Penelitian ini memperoleh hasil peran aktor yang terkait dalam penanganan banjir bandang dengan mengindikasikan kesatuan dari antar instansi dikatakan kurang bagus. Hal ini tidak ditunjukkan oleh salah satu aktor, *Stakeholder* dalam pemerintahan masih kurang berpengaruh disebabkan oleh posisi *stakeholder* masih di bawah. Penelitian ini berkaitan karena mencakup peran dari *stakeholder*

dalam penanganan bencana banjir yang merupakan salah satu permasalahan yang akan peneliti kaji hanya saja penelitian ini lebih memfokuskan dalam peran *stakeholder* saja.

Rujukan kesembilan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nahot Tua Parlindungan Sihalo (2021) yang berjudul “*Collaborative governance* Dalam Penanganan Banjir di Kota Medan” penelitian tersebut di latar belakang oleh tindakan kolaboratif yang dilakukan oleh Kota Medan dalam menangani banjir. Fokus dalam penelitian ini mengenai aspek yang harus diutamakan dalam menjalankan *Collaborative governance* dan bentuk kolaborasi yang tepat untuk Pemerintah Kota Medan dengan merujuk pada teori DeSeve (2007) tentang kerjasama pemerintahan, dan hasil penelitian dari Ansell & Gash (2008) tentang *Collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghimpun literatur dari lima *database* yakni *Google Scholar*, *Research Gate*, *DOAJ*, *Springer Link*, dan *Science Direct*.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dalam *collaborative governance* terdapat empat faktor, yaitu: a) mengatur siapa yang termasuk member kolaborasi dan siapa yang tidak termasuk, b) mengatur norma-norma yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, c) kebebasan untuk memutuskan aktor menjalankan tugasnya dan d). mengatur semua yang terkait dalam kegiatan. Penelitian tersebut berkaitan karena dapat mengungkap bagaimana peta kolaborasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan lembaga yang berkaitan untuk menanggulangi bencana banjir, hasil dari penelitian inilah dapat menjadi tumpuan dalam penelitian penulis dalam menentukan prioritas. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena dalam penelitian ini serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian ini

dapat dijadikan rujukan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan inovasi yang lebih lanjut dalam *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir untuk kedepannya agar jauh lebih baik.

Rujukan kesepuluh dari riset yang dilakukan oleh Syahputra Adisanjaya Suleman dan Nurliana Cipta Apsari (2017) yang berjudul “Peran *Stakeholder* Dalam Manajemen Bencana Banjir”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena manajemen banjir terutama pada mitigasi, untuk meminimalisir dampak dari bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode perolehan data memakai studi documenter.

Dalam penelitian ini memperoleh hasil partisipasi seluruh instansi pemerintah dalam penanggulangan banjir, yang meluas sebagian besar lembaga, baik lembaga internal maupun lembaga eksternal. Hal tersebut membuktikan bahwa masing-masing organisasi mempunyai tugasnya masing-masing mitigasi bencana banjir. Dalam mitigasi bencana banjir yang berperan sebagai *stakeholder* adalah organisasi swasta dan lembaga internasional, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga BNPB. Kaitan dengan penelitian ini adalah bahwa peran *stakeholder* sangat dibutuhkan dalam manajemen bencana banjir. Oleh karena itu penelitian ini dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui peran *stakeholder* dalam menangani bencana banjir.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas tentang peran pemerintahnya saja dalam penanganan banjir (Ayu, 2020; Suryadi, 2020; Nia, 2018; Nurliana, 2017). Namun, ada juga yang membahas strategi pemerintah dalam penanggulangan banjir (putri, 2021; Dwi Nur, 2019; Mariana, 2015). Dan ada juga penelitian terdahulu yang membahas tentang *collaborative governance* yang mengacu pada teori teori *collaborative governance* dan kendala apa saja

yang ditemukan dalam pengelolaan infrastruktur akibat banjir (Dwi Agustina, 2018; Tika, 2021; Sihaholo, 2021).

Dari beberapa rujukan untuk acuan dalam penelitian ini, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana banjir saja, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana banjir dengan melakukan kolaborasi antara masyarakat dan *stakeholder* dengan penerapan keberhasilan dan kegagalan penanggulangan banjir pada *collaborative governance*, apakah penanggulangan banjir sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam penelitian ini merujuk pada teori indikator keberhasilan *collaborative governance* menurut De Seve (2007).

Secara akademis, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para *stakeholder* khususnya dalam penanggulangan bencana banjir secara efektif.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Signifikasnsi praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah dan memperluas pengetahuan terkait permasalahan dalam penanganan banjir yang diinformasikan oleh media massa kepada pihak pemerintah dan pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pendekatan berbasis kolaborasi, serta menjadi informasi untuk masyarakat terkait *collaborative governance* dalam menangani banjir.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam rangka menanggulangi bencana banjir terutama Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bekasi yang diharapkan dapat terus mengembangkan kolaborasi dengan pihak yang terkait. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terutama pada perguruan tinggi yang harus terus ikut berkontribusi dalam menjalankan edukasi terkait penanggulangan banjir kepada masyarakat.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan menjadi sebagai sumber pemahaman mengenai *collaborative governnace* yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan banjir khususnya media massa. selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk menunjukkan realitas sosial yang dilakukan oleh media massa dalam berkontribusi untuk penanggulangan banjir. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan untuk masyarakat yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait *collaborative governance*, serta penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pemecahan masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan eksplorasi pembahasan yang mendasari penelitian ini, maka perlu diusulkan suatu sistem pembelajaran sebagai kerangka dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penlitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bagian ini membahas tentang *collaborative govrnance*, konsep penanggulangan bencana banjir, partisipasi masyarakat dan peranan *stakeholder*, dengan menganalisis dan pengembangan materi pembelajaran yang diteliti, kerangka pemikiran, serta asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, teknik perekrutan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.